



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a BAB I PENDAHULUAN
  - b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
  - c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - d BAB IV PENUTUP
- KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:
- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
  - b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
  - c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 281 TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025







Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Pemerintah Kota Batam

# PERUBAHAN RENCANA KERJA ( **RENJA** ) TAHUN 2025



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 memuat rumusan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2030.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juni 2025

Kepala Dinas Koperasi dan  
Usaha Mikro Kota Batam



HENDRI ARULAN,S.Pd

NIP. 196707191991031009



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN     TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN) .....</b>	<b>4</b>
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 .....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	22
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT     DAERAH.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Catatan Penting .....	42
4.2 Kaidah Pelaksanaan .....	42
4.3 Rencana Tindak Lanjut .....	42

## **DAFTAR TABEL**

Table 2.0.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/2025 s/d Triwulan I.....	5
Table 2.0.2. Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 s/d Triwulan I .....	22
Table 3.0.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 .....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor B/151/000.7.2.4/VI/2025 tentang *Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025* maka



*Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam* menyusun Perubahan Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-PD) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L embaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
11. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1605;

12. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 7 tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Perubahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
2.1	Landasan Hukum
3.1	Maksud dan Tujuan
4.1	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025
2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I 2025
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP
4.1	Catatan Penting
4.2	Kaidah Pelaksanaan
4.3	Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

\* Program

- Kegiatan : Semua program/kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

\* Program

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pengembangan Umkm

- Kegiatan Semua program/kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

\* Program

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

- Kegiatan program pemberdayaan UMKM melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan



**Table 2.0.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/2025 s/d Triwulan I**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun	RealisasiCapaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
1						<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>28,81</b>	<b>73,81</b>	<b>256,1957654</b>
1	1					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	28,81	31	107,6015272
1	1	1				Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	65	65	100
2						<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Sehat</b>	<b>83,33</b>	<b>100</b>	<b>120,0048002</b>

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja CapaianProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun	RealisasiCapaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2	1					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	43,48	43,48	100
2	1	1				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30	30	100
3						<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya</b>	<b>25,36</b>	<b>65,36</b>	<b>257,7287066</b>
3	1					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	52,69	52,69	100
3	1	1				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	65	65	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja CapaianProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun	RealisasiCapaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
4						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	-	-	
5						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35,34	100	282,9654782
5	1					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pemberdayaan usaha	35,34	100	282,9654782
5	1	1				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100	100	100
5	1	2				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	450	450	100
5	1	3				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	791	791	100



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja CapaianProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun	RealisasiCapaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
5	1	4				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1 Dokumen	1 Domuken	100
5	1	5				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	660	660	100
6						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif</b>	<b>45,45</b>	<b>100</b>	100
6	1					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	45,45	100	100
6	1	1				Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	470	470	100
7						<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b> <b>URUSAN DAERAH</b>	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja CapaianProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun	RealisasiCapaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	1					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	0	0
7	2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100	100	100
7	2	1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	43	100
7	3					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100	100	100
7	3	1				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
7	4					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100	100	100
7	4	1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	12	12	100
7	4	2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun	RealisasiCapaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	5					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100	100	100
7	5	1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	1	1	100
7	5	2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56	56	100
7	5	3				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	100
7	6					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100	100	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun	RealisasiCapaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	6	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	100
7	6	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100
7	6	3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	100
7	6	4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100
7	6	5				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100



Triwulan I Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
								Target 2025				
								Sebelum	Sesudah			
1	2					3	4	5	6	7	8	
						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	50%	50%	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	50%	50%	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	50%	
	2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	100 %	-	-	
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	2 Orang	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	50%	50%
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	100 %
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6 Dokumen	50%
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	50%	50%
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	50%	50%
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50%
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	50%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit	28	50%
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%
2	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	30.23 %	42,23 %	-	-
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	9 %	257 Unit Usaha	-	-
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	89 Unit Usaha	70 Unit Usaha	-	-
3	2	17	04			PROGRAM KESEHATAN KOPERASI PENILAIAN KSP/USP	Persentase koperasi yang sehat	88.89 %	88.89 %	-	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	55.56 %	55.56 %	-	-
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	-	-
4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	27.26 %	43.10 %	-	-
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	52.91 %	724 Orang	-	-
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	370 Orang	400 Orang	-	-
5	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	24.00 %	17.77 %	-	-



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.51 %	167 Unit	-	-
	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	200 Keluarga	64 Keluarga	-	-
	2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	-	-
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pemberdayaan usaha	37.45 %	86.76 %	36,46%	36,46%
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	655 Unit Usaha	3413 Unit	-	-
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0 Unit Usaha	
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	1463 Unit Usaha	800 Unit Usaha	50%
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1800 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	-
	2	17	07	2.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	210 Unit Usaha	-	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	-
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Orang	150 Orang	75 Orang	50%
7	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha	48.60 %	57.19 %		
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	850 Unit Usaha	850 Unit Usaha	425	50%
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif				
	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	50%
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	235 Unit Usaha	0 Unit Usaha		
						UPTD Pengelolaan Dana Bergulir					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
8	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-		
	2	17	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit Kerja yang terlaksana	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	50%
	2	17	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	50%
						UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
9	2	17	07			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA</b>	-	-	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
								Target 2025			
								Sebelum	Sesudah		
1	2					3	4	5	6	7	8
						KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-		
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100 Unit Usaha	50



**Table 2.0.2. Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 s/d Triwulan I**

Pencapaian Kinerja Pelayanan *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan omzet Koperasi	24	%	15,01	%	
2	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	63.74	%	20,45	%	
3	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	28.23	%	18,05	%	
4	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	50	%	

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

*Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Perangkat Daerah secara jelas dan rinci yang terjadi pada masing-masing bidang atau bagian di Perangkat Daerah.*

Contoh;

*1. Isu-isu penting terkait Koperasi di Kota Batam*

**1. Tata Kelola Koperasi yang Lemah (Good Cooperative Governance)**

- Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas).*
- Minimnya laporan keuangan yang diaudit serta kurangnya pengawasan dari pengurus dan anggota.*

**2. Kurangnya Literasi dan Kompetensi SDM Koperasi**

- Pengurus dan manajer koperasi banyak yang belum memiliki pemahaman memadai terkait manajemen modern, akuntansi, pemasaran, dan teknologi digital.*
- Lemahnya pendidikan koperasi membuat banyak koperasi berjalan kurang profesional.*

**3. Akses Permodalan dan Pembiayaan**

- Banyak koperasi kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.*
- Permodalan masih sangat bergantung pada simpanan anggota, yang seringkali tidak cukup untuk pengembangan usaha.*

**4. Tantangan Digitalisasi**

- Sebagian besar koperasi tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.*

- Koperasi perlu bertransformasi digital untuk bersaing dengan entitas bisnis lain, terutama di era ekonomi digital.

#### **5. Iklim Regulasi dan Pengawasan yang Belum Optimal**

- Masih terdapat tumpang tindih regulasi, dan pengawasan koperasi belum menyeluruh dan efektif.
- Koperasi simpan pinjam, misalnya, menghadapi tantangan regulasi dan moral hazard akibat kurangnya kontrol dari otoritas.

#### **6. Citra dan Kepercayaan Publik**

- Maraknya koperasi bodong atau koperasi yang bermasalah menurunkan citra koperasi di mata masyarakat.
- Rendahnya kepercayaan publik berdampak pada partisipasi dan minat masyarakat terhadap koperasi.

#### **7. Keterbatasan Inovasi Model Bisnis**

- Banyak koperasi belum mampu mengembangkan model bisnis yang kompetitif, inovatif, dan berbasis kebutuhan pasar.
- Koperasi belum banyak terlibat dalam rantai nilai industri (value chain) yang produktif.

#### **8. Kurangnya Sinergi antar Koperasi**

Koperasi-koperasi berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya konsolidasi atau kerja sama antarkoperasi untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi.

#### **Rekomendasi:**

- 1) **Reformasi kelembagaan dan hukum koperasi**, termasuk revisi UU Perkoperasian yang adaptif terhadap zaman.
- 2) **Peningkatan kapasitas SDM koperasi** melalui pelatihan berkelanjutan
- 3) **Digitalisasi sistem manajemen koperasi**, termasuk layanan keuangan berbasis aplikasi.
- 4) **Kemitraan strategis** dengan sektor swasta dan BUMN untuk masuk dalam rantai pasok.
- 5) **Penguatan pengawasan internal dan eksternal** untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan koperasi

### **2. Isu-isu penting terkait Bidang Usaha Mikro**

#### **1. Akses Permodalan yang Terbatas**

- Sebagian besar pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan yang memadai sehingga sulit mengakses pinjaman dari perbankan.
- Ketergantungan pada pembiayaan informal (rentenir) masih tinggi.
- Kurangnya literasi keuangan menyebabkan program pembiayaan pemerintah tidak terserap maksimal.

#### **2. Keterbatasan SDM dan Manajerial**

- Banyak pelaku usaha mikro masih mengandalkan keterampilan tradisional tanpa dukungan manajemen usaha yang baik.
- Kurangnya pelatihan dan pendidikan wirausaha yang berkelanjutan menghambat pengembangan kapasitas.

#### **3. Rendahnya Akses ke Pasar yang Luas**

- Usaha mikro seringkali hanya menjangkau pasar lokal dengan jangkauan sempit.
- Lemah dalam pemasaran digital, branding, dan pengemasan produk.
- Kurang terhubung dengan rantai pasok industri besar (value chain integration).

#### **4. Transformasi Digital yang Belum Merata**

- Masih banyak usaha mikro yang belum memanfaatkan teknologi informasi seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi kasir.
- Minimnya infrastruktur digital di daerah pedesaan atau pinggiriran memperparah kesenjangan digital.

#### **5. Legalitas dan Formalisasi Usaha**

- Banyak usaha mikro belum memiliki legalitas usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) atau izin usaha lainnya.
- Hal ini membatasi mereka mengakses program bantuan pemerintah dan peluang kerja sama dengan sektor formal.

#### **6. Ketergantungan terhadap Sektor Informal**

- Sebagian besar usaha mikro berada di sektor informal, sehingga rawan terhadap fluktuasi ekonomi, krisis, dan bencana.
- Tidak memiliki perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, pensiun, atau asuransi usaha.

#### **7. Persaingan yang Ketat dan Tidak Seimbang**

- Produk usaha mikro sering kalah bersaing dengan produk industri besar maupun produk impor.
- Kurangnya inovasi dalam desain, kualitas, dan layanan menjadi kendala daya saing

#### **8. Dampak Krisis dan Ketahanan Usaha**

- Usaha mikro sangat rentan terhadap krisis (seperti pandemi, inflasi, bencana alam) karena minimnya cadangan modal dan proteksi.
- Tidak adanya perencanaan risiko (risk mitigation) memperparah kondisi saat terjadi gangguan ekonomi.

#### **9. Kurangnya Pendampingan dan Akses Informasi**

- Banyak pelaku usaha mikro tidak mendapat pendampingan yang memadai dari pemerintah atau lembaga lain.
- Minimnya akses informasi terkait regulasi, pasar, pelatihan, atau teknologi baru menghambat perkembangan usaha.

#### **10. Inkonsistensi Kebijakan dan Fragmentasi Program**

- Banyak program bantuan dan pengembangan usaha mikro yang tidak terkoordinasi dengan baik antar lembaga.
- Program seringkali tidak berkelanjutan dan tidak berbasis kebutuhan riil pelaku usaha.

-

### **REKOMENDASI :**

#### **1. Memperluas Akses Permodalan Inklusif**

- **Reformasi mekanisme pembiayaan** agar lebih fleksibel (tanpa agunan, berbasis karakter).
- Perluasan program **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** dengan pendampingan intensif.
- Penguatan koperasi, BUMDes, dan fintech sebagai alternatif pembiayaan mikro.

#### **2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Manajemen**

- Program pelatihan kewirausahaan terpadu berbasis sektor usaha dan kebutuhan riil.
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan swasta dalam pelatihan, mentoring, dan inkubasi usaha.
- Penyusunan kurikulum praktis usaha mikro oleh pemerintah daerah/komunitas.

#### **3. Akselerasi Transformasi Digital Usaha Mikro**

- Subsidi atau bantuan digital onboarding ke marketplace dan media sosial.
- Pelatihan digital marketing, penggunaan e-wallet, POS (point of sales), dan aplikasi pembukuan sederhana.
- Pengembangan platform e-commerce khusus UM/UMKM lokal.

#### **4. Percepatan Legalitas dan Formalisasi Usaha**

- Simplifikasi dan jemput bola untuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Integrasi legalitas dengan akses program pemerintah (seperti bantuan, pelatihan, atau pemasaran).

- Pemberdayaan perangkat desa/kelurahan untuk membantu proses legalisasi usaha mikro.

#### **5. Penguatan Akses Pasar dan Rantai Nilai**

- Penciptaan **pasar khusus UM (UM Marketplaces)** di pusat kota, rest area, atau instansi pemerintah.
- Wajib serap produk usaha mikro oleh BUMN, BUMDes, dan proyek pemerintah (melalui e-katalog).
- Fasilitasi kemitraan usaha mikro dengan pelaku usaha besar (skema kemitraan inklusif).

#### **6. Perlindungan dan Ketahanan Usaha Mikro**

- Penyediaan **asuransi mikro** dan akses jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan untuk pelaku usaha mikro).
- Pelatihan manajemen risiko sederhana: pengelolaan stok, pengaturan cash flow, dll.
- Bantuan cepat tanggap saat terjadi bencana atau krisis ekonomi.

#### **7. Reformasi Kebijakan yang Terintegrasi**

- **Sinkronisasi program lintas kementerian/lembaga** agar tidak tumpang tindih dan lebih efisien.
- Penguatan peran **Dinas Koperasi & UMKM daerah** dalam mendata, memantau, dan mendampingi usaha mikro.
- Penyusunan **roadmap pengembangan usaha mikro** per sektor dan wilayah.

#### **8. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data**

- Penguatan sistem **data usaha mikro yang real-time dan terverifikasi** (misal melalui sensus UMKM digital).
- Pemetaan potensi dan kebutuhan usaha mikro untuk perencanaan program berbasis data

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan  
  
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan  
  
Pelaksanaan Penilaian Kegiatan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan
      - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
      - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan  
  
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Usaha Mikro (UMKM)
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
    - Subkegiatan



- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - Penyusunan Basis Data
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
  - Fasilitasi Kemudahan Perizinan
  - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
  - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
6. Program Pengembangan UMKM
- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
    - Subkegiatan
      - Pengembangan Usaha Mikro
      - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
      - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub
    - Subkegiatan
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub
    - Subkegiatan
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Subkegiatan
      - Pengadaan Mebel
      - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan
    - Subkegiatan
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Subkegiatan
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
  - Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Peningkatan Pelayanan BLUD
- Subkegiatan
    - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

**Table 3.0.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target		Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
					DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						27.610.562.651,00	22.605.682.683,00	-5.004.879.968,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						27.610.562.651,00	22.605.682.683,00	-5.004.879.968,00	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						26.793.475.651,00	21.269.319.278,00	-5.524.156.373,00	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100	100	15.462.474.685,00	12.982.589.378,00	-2.479.885.307,00	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100	100	12.553.230.965,00	11.261.530.078,00	-1.291.700.887,00	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	50 Orang/bulan	12.553.230.965,00	11.212.690.078,00	-1.340.540.887,00	
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	48.840.000,00	48.840.000,00	

2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	100	73.658.000,00	58.160.000,00	- 15.498.000,0 0	
2	1	0	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	4 Orang	2 Orang	73.658.000,00	58.160.000,00	- 15.498.000,0 0	
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100	100	381.762.000,0 0	235.816.900,0 0	- 145.945.100, 00	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.160.000,00	3.564.000,00	- 3.596.000,00	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	153.072.000,0 0	48.807.000,00	- 104.265.000, 00	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	23.142.000,00	-	- 23.142.000,0 0	

2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	7	1	6	5			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.942.000,00	7.170.000,00	- 5.772.000,00	
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	7	1	6	9			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	185.446.000,0 0	176.275.900,0 0	- 9.170.100,00	
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	100	1.376.820.680 ,00	354.468.000,0 0	- 1.022.352.68 0,00	
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	7	1	7	6			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	590.269.680,0 0	354.468.000,0 0	- 235.801.680, 00	
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	7	1	7	9			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	786.551.000,0 0	-	- 786.551.000, 00	



2	1 7	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi p e n y e d i a a n j a s a penunjang sesuai p e r e n c a n a a n	Persentase realisasi p e n y e d i a a n j a s a penunjang sesuai p e r e n c a n a a n	100	100	641.709.040,0 0	263.839.020,0 0	- 377.870.020, 00	
2	1 7	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	322.830.400,0 0	195.825.000,0 0	- 127.005.400, 00	
2	1 7	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	318.878.640,0 0	68.014.020,00	- 250.864.620, 00	
2	1 7	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100	435.294.000,0 0	808.775.380,0 0	373.481.380, 00	
2	1 7	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.540.000,00	72.620.000,00	29.080.000,0 0	
2	1 7	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	201.274.000,00	146.750.000,00	- 54.524.000,00	
2	1 7	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	17 Unit	66.830.000,00	55.240.000,00	- 11.590.000,00	
2	1 7	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	123.650.000,00	534.165.380,00	410.515.380,00	
2	1 7	0 3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang aktif	Persentase koperasi yang aktif	30.23	42,23	49.690.000,00	37.437.000,00	- 12.253.000,00	
2	1 7	0 3	2.0 1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	9	257 Unit Usaha	49.690.000,00	37.437.000,00	- 12.253.000,00	
2	1 7	0 3	2.0 1	000 4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									

							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	89 Unit Usaha	70 Unit Usaha	49.690.000,00	37.437.000,00	- 12.253.000,00	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase koperasi yang sehat	Persentase koperasi yang sehat	88.89	88.89	18.185.000,00	44.712.500,00	26.527.500,00	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	55.56	55.56	18.185.000,00	44.712.500,00	26.527.500,00	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	18.185.000,00	44.712.500,00	26.527.500,00	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	27.26	43.10	820.684.000,00	92.344.250,00	- 728.339.750,00	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang mendapatkan pendidikan dan	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang mendapatkan pendidikan dan	52.91	724 Orang	820.684.000,00	92.344.250,00	- 728.339.750,00	

					dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	latihan perkoperasian	latihan perkoperasian						
2	1 7	0 5	2.0 1	000 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	370 Orang	400 Orang	820.684.000,0 0	92.344.250,00	- 728.339.750, 00	
2	1 7	0 6			PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI		Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	24.00	17.77	1.319.882.200 ,00	336.010.000,0 0	- 983.872.200, 00	
2	1 7	0 6	2.0 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.51	167 Unit	1.319.882.200 ,00	336.010.000,0 0	- 983.872.200, 00	
2	1 7	0 6	2.0 1	000 2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	200 Keluarga	64 Keluarga	692.261.386,0 0	-	- 692.261.386, 00	
2	1 7	0 6	2.0 1	000 3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi									

							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	443.088.814,00	336.010.000,00	- 107.078.814,00	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha	0 Unit Usaha	184.532.000,00	-	- 184.532.000,00	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pemberdayaan usaha	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pemberdayaan usaha	37.45	86.76	5.994.121.766,00	2.709.650.950,00	- 3.284.470.816,00	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	655 Unit Usaha	3413 Unit	5.994.121.766,00	2.709.650.950,00	- 3.284.470.816,00	

					dengan Para Pemangku Kepentingan	dengan Para Pemangku Kepentingan								
2	1	0	2.0	000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	50 Unit Usaha	953.128.000,00	374.167.500,00	- 578.960.500,00	
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	1463 Unit Usaha	916.255.000,00	1.203.753.500,00	287.498.500,00	
2	1	0	2.0	000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1800 Unit Usaha	350 Unit Usaha	1.509.971.766,00	-	- 1.509.971.766,00	
2	1	0	2.0	000	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	210 Unit Usaha	1.560.623.000,00	180.626.500,00	- 1.379.996.500,00	
2	1	0	2.0	001	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									

							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	-	-	
2	1	0	2.0	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Orang	150 Orang	1.054.144.000,00	951.103.450,00	- 103.040.550,00	
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha	48.60	57.19	3.128.438.000,00	5.066.575.200,00	1.938.137.200,00	
2	1	0	2.0		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	850 Unit Usaha	2250 Unit	3.128.438.000,00	5.066.575.200,00	1.938.137.200,00	
2	1	0	2.0	000	Pengembangan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	335 Unit Usaha	1500 Unit Usaha	1.113.496.000,00	4.860.538.000,00	3.747.042.000,00	
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	30 Unit Usaha	381.576.000,00	114.642.000,00	- 266.934.000,00	
2	1	0	2.0	000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									



							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	235 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1.633.366.000,00	91.395.200,00	- 1.541.970.800,00		
					UPTD Pengelolaan Dana Bergulir							810.000.000,00	950.825.485,00	140.825.485,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							810.000.000,00	950.825.485,00	140.825.485,00	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							810.000.000,00	950.825.485,00	140.825.485,00	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100	100	810.000.000,00	950.825.485,00	140.825.485,00		
2	17	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Unit Kerja yang terlaksana	Unit Kerja yang terlaksana	-	1 Unit Kerja	810.000.000,00	950.825.485,00	140.825.485,00		
2	17	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	810.000.000,00	950.825.485,00	140.825.485,00		
					UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)							7.087.000,00	385.537.920,00	378.450.920,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.087.000,00	385.537.920,00	378.450.920,00	

2	1 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.087.000,00	385.537.920,0 0	378.450.920,00		
2	1 7	0 7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	37.45	86.76	7.087.000,00	385.537.920,0 0	378.450.920,00	
2	1 7	0 7	2.0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	655 Unit Usaha	3413 Unit Usaha	7.087.000,00	385.537.920,0 0	378.450.920,00	
2	1 7	0 7	2.0 1	000 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	1463 Unit Usaha	7.087.000,00	385.537.920,0 0	378.450.920,00	

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan Rancana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2030 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Triwulan I.

### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025);
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 disusun.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD